

## **Sambutan Dirjen Penataan Ruang pada :**

### **KAJI PAKAR DENGAN PARA AHLI DAN PEMERHATI SISTEM INFORMASI TENTANG PEMBANGUNAN DATABASE PENATAAN RUANG**

Di Hotel Ambhara, 27 Agustus 2003

**Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh**

Peserta Kaji Pakar yang saya hormati,

Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada pagi ini kita bisa bertemu dengan sehat walafiat pada Forum yang sangat penting ini untuk merumuskan Grand Strategy Pembangunan Sistem Informasi Penataan Ruang. Pertemuan ini tentu tidak berdiri sendiri dan tidak boleh lepas dari konteks Penataan Ruang secara Nasional, khususnya dalam menindaklanjuti Rakernas BKTRN awal Juli yang lalu di Surabaya.

Pada Rakernas tersebut Presiden RI mengatakan bahwa “berbagai persoalan tata ruang yang terjadi, lebih banyak ditimbulkan oleh adanya penyimpangan, sikap kurang konsisten, dan kelemahan kita semua dalam mengendalikan penegakan norma yang justru telah kita tetapkan”. Bagi kita peringatan tersebut hendaknya menjadi cambuk untuk lebih sungguh-sungguh melaksanakan dan menegakkan norma-norma yang telah ada dan melengkapinya untuk hal-hal yang perlu diisi. Dalam konteks Sistem Informasi Penataan Ruang, telah ditetapkan PP 10/2000 sebagai turunan dari UU 24/1992 yang telah mempertimbangkan kaedah dalam UU 22/1999 sebagai norma yang harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama. Dalam konteks yang lebih mikro, Menkimpraswil sebagai Ketua Tim Teknis BKTRN juga mengindikasikan bahwa “Upaya penyiapan dukungan Sistem penyelenggaraan penataan ruang nasional melalui perpetaan dan sistem informasi penataan ruang” menjadi concern kita bersama untuk terus menerus ditingkatkan progres pengembangan dan penyelesaiannya. Untuk itu saya menganjurkan kepada para pakar, profesional dan praktisi yang hadir pada kesempatan ini untuk mencermati norma-norma tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu sumber rujukan dalam menyusun Grand Strategy Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang.

Fakta yang terjadi di lapangan berikut barangkali dapat digunakan sebagai bahan renungan dalam penyusunan grand strategy dimaksud agar rumusan tersebut nantinya bisa dioperasionalisasikan. Misalnya Pulau Jawa yang memiliki hanya tujuh persen dari total luas wilayah daratan Indonesia disesaki 65 persen penduduk Indonesia atau 125 juta jiwa. Sementara itu potensi air hanya 4,5 persen dari potensi air di Indonesia sehingga menimbulkan benturan kepentingan. Akibatnya, pengembangan sumber daya air di Pulau Jawa sudah diambang kritis. Selain itu infrastruktur ekonomi dan sosial yang relatif lebih baik tetap mendorong investor dan pendatang menyerbu serta mengembangkan usahanya di Pulau Jawa. Bagi banyak pihak, pulau itu tetap dianggap barometer keberhasilan ekonomi dan sosial.

Tidak kurang 65 persen sektor industri Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan total angkatan kerja mencapai 60 persen dari tenaga kerja nasional. Dinamika kepadatan penduduk itu sangat berpengaruh pada kebutuhan permukiman, pengairan,

pertanian, industri dan pengembangan infrastruktur. Konsekuensinya, kawasan hutan negara, kawasan pertanian, dan kawasan hijau lainnya harus beradu kepentingan untuk mawadahi kebutuhan. Keadaan ini menyebabkan kawasan hutan di Jawa mengalami tekanan sangat berat.

Penebangan hutan tanpa kendali dan penjarahan sumber daya hutan yang marak menyebabkan sebagian kawasan hutan menjadi gundul dan fungsi ekonominya hilang. Bahkan selama 1998 sampai dengan 2001, sedikitnya 350.000 hektar hutan di Jawa hancur. Daerah yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan lindung tak jarang dimanfaatkan untuk membuka usaha pertanian yang sarat dengan unsur kimia dan kurang mengindahkan aspek konservasi alam (Kompas, 21 Agustus 2003).

Hadirin yang saya hormati,

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa penataan ruang merupakan proses pemanfaatan resources bagi generasi sekarang dan generasi mendatang secara berimbang dan sustainable yang mencakup proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam setiap tahapannya diperlukan data dan informasi baik spasial dan non-spasial yang berasal dari multi institusi dan multi-level baik Pusat maupun Daerah. Kenyataan yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa kebanyakan data dan informasi yang ada di berbagai institusi, seperti data tersebut diatas disajikan dalam format maupun struktur yang berbeda. Ada yang disajikan secara spasial saja, dan ada pula yang disajikan secara tekstual saja. Pada saat di-superimpose, perbedaan struktur dan format tersebut sangat jelas terlihat. Perbedaan tersebut terjadi karena berbagai alasan baik teknis maupun non-teknis, seperti misalnya kurang tersedianya waktu untuk menyiapkan data sementara permintaan telah lama menunggu, kurangnya sumber dana sementara permintaan mengharuskan adanya data untuk satu analisa dengan kedalaman tertentu. Kondisi tersebut mengharuskan kita untuk mengintegrasikannya, terutama apabila kita akan menggunakan data tersebut dalam satu sistem dengan data yang telah kita siapkan. Hal ini berarti kita harus mengeluarkan resources dan upaya yang tidak kecil dan ini sebenarnya bisa diminimalisasikan kalau format dan struktur data dan informasi tersebut telah standar. Selain hal tersebut sering kita dapatkan dalam praktek keseharian bahwa semangat untuk membangun system atau membangun database tidak diikuti dengan kesungguhan dan konsistensi dalam meng-update (memperbarui) data, sehingga banyak sekali ditemukan database, baik yang manual maupun digital bahkan yang ada di web (internet) datanya sangat jarang atau tidak pernah di-update. Untuk itu upaya ke arah memperbaiki kekurangan tersebut perlu terus ditingkatkan.

Hadirin yang saya hormati,

Secara umum dapat dikatakan bahwa berbicara Penataan Ruang berarti juga bicara aspek spasial atau Sistem Informasi Spasial. Untuk membangun Sistem Informasi Spasial, khususnya Database Penataan Ruang, kita tidak bisa menafikan sejarah upaya perkembangan yang pernah dilakukan selama ini, baik lokal, sektoral maupun Nasional. Bukan hanya itu, tetapi aspek kelembagaan, SDM dan IPTEK nya juga perlu dicermati secara baik dan sinambung. Disamping itu Database Penataan Ruang merupakan data dan informasi publik yang harus dikelola secara sinergis sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja kita sebagai warga komunitas penataan ruang. Data tersebut yang sebagian besar berasal dari berbagai instansi yang syarat dengan lokalitasnya perlu

dibakukan format dan strukturnya untuk kepentingan capabilitas dan sustainabilitas datanya. Akan tetapi hingga saat ini belum ditemukan formulasi Grand Strategy yang komprehensif dan diacu oleh seluruh elemen stakeholder dan masyarakat dalam pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang secara nasional.

Dalam konteks tersebutlah maka pertemuan ini diselenggarakan yaitu untuk menyusun Grand Strategy Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang, yang diharapkan bisa dijadikan acuan pada tingkat Nasional.

Ibu dan Bapak para peserta Kaji Pakar yang saya hormati,

Selaku Dirjen Penataan Ruang dan sekaligus sebagai Sekretaris Tim Teknis BKTRN, kami mengharapkan dalam forum yang relatif independen (karena pesertanya adalah para pakar dan profesional) dan bebas gangguan (karena diselenggarakan bukan di ruang rapat kantor Ditjen Penataan Ruang) ini mampu dirumuskan Grand Strategy pembangunan Sistem Informasi penataan ruang, khususnya untuk pemantauan pemanfaatan ruang nasional dan pulau, atau paling tidak dapat menjaring masukan-masukan penting dan strategis yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan Grand Strategy dimaksud. Hal tersebut kami tekankan agar grand strategy ini nantinya menjadi milik bersama, artinya akan menjadi dasar berpijaknya berbagai stakeholder dalam membangun system informasi penataan ruang secara nasional. Untuk itu kami berpesan agar segera setelah terumuskan, grand strategy tersebut perlu didorong untuk diangkat dalam forum BKTRN melalui POKJA yang ada untuk dijadikan kebijakan nasional. Satu hal lagi yang kami anggap penting dan perlu kami ingatkan adalah bahwa mengingat kompleksitasnya masalah penataan ruang dan sangat disadari memerlukan waktu panjang untuk mengimplementasikan grand strategi ini, maka hendaknya di dalam grand strategi tersebut nantinya dilengkapi dengan action plan yang jelas dan membumi (realistis).

**Sebagai penutup** saya ingin mengucapkan selamat berdiskusi, semoga bisa mendapatkan hasil keputusan atau masukan-masukan yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa ini. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirahim "**KAJI PAKAR DENGAN PARA AHLI DAN PEMERHATI SISTEM INFORMASI TENTANG PEMBANGUNAN DATABASE PENATAAN RUANG**" secara resmi kami nyatakan dibuka.

**Bilahi Taufik Walhidayah**  
**Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.**

Ttd.

Dirjen Penataan Ruang

**Ir. Sjarifuddin Akil**